

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja UPTD RSUD Puruk Cahu Tahun 2021 merupakan pelaksanaan tahun ketujuh dari Rencana Strategis UPTD RSUD Puruk Cahu, yang merupakan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 serta Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Rencana Kerja yang disingkat Renja mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, hal ini sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan “Renja SKPD sebagai penjabaran Renstra SKPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat”. Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa fungsi Renja UPTD RSUD Puruk Cahu menerjemahkan dan mengoperasikan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Murung Raya ke dalam program dan kegiatan sedemikian rupa sehingga berkontribusi kepada pencapaian tujuan dan capaian program secara keseluruhan dan tujuan strategis jangka menengah yang tercantum dalam RPJMD.

Proses penyusunan Renja didasarkan pada penjaringan aspirasi yang diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahunan dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun sebelumnya. Lebih lanjut penyusunan Dokumen RKPD dan Renja SKPD juga diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat, hal ini sejalan dengan Pasal 2 (dua) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa Daerah Kabupaten dan Kota merupakan bagian dari Provinsi serta mempunyai hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya lainnya. Musrenbang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan antar kesepakatan antar pelaku pembangunan tentang rancangan RKPD dan Renja SKPD, yang menitikberatkan pada pembahasan untuk sinkronisasi sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan SKPD serta masyarakat dalam pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Murung Raya.

Sebagai Dokumen resmi Pemerintah Daerah, Rencana Kerja SKPD yang dilanjutkan disebut dengan Renja SKPD mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Oleh

karena itu RKPD dan Renja SKPD berfungsi menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana tahunan dengan memuat arah kebijakan –pembangunan, prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah dan program kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Sebagai rencana operasional. RKPD merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan APBD.

Rancangan Renja SKPD dibahas pada forum SKPD yang dikoordinasikan oleh Baplitbangda, dimana pembahasan tersebut meliputi penyelerasan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD berdasarkan usulan program dan kegiatan hasil musrenbang kecamatan, penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD, penyelerasan program dan kegiatan antar SKPD dalam rangka sinergi pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD, penyesuaian pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing SKPD. Renja SKPD ditetapkan melalui Keputusan Kepala SKPD. Kemudian Renja tersebut dipergunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan pada tahun $n+1$.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RPJMD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RPJMD;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Puruk Cahu (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2008 Nomor 63).
12. Peraturan Bupati Murung Raya Nomor : 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Puruk Cahu (Berita Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2016 Nomor 246);
13. Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 20 Tahun 2016 tentang Sistem Akutansi Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Puruk Cahu Kabupaten Murung Raya (Berita Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2016 Nomor 247);
14. Keputusan Bupati Murung Raya Nomor 188.45/354/2015 Tanggal 18 Agustus 2015 tentang Penetapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Puruk Cahu.

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program, dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja / pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2021.

2. Tujuan

- a. Untuk merumuskan program, dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi UPTD RSUD Puruk Cahu selama tahun 2021.
- b. Mewujudkan sinergitas antara perencanaan dan penganggaran.
- c. Menciptakan efisiensi alokasi sumber daya dalam perencanaan pembangunan daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana kerja UPTD RSUD Puruk Cahu Tahun 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan secara ringkas latar belakang penyusunan rencana kerja UPTD RSUD Puruk Cahu, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, dan Sistematika Penulisan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja SKPD Tahun lalu (Tahun-3) dan perkiraan tahun berjalan (Tahun n-1) yang terdiri dari Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD, Analisis Kinerja Pelayanan SKPD, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD, Review Terhadap Rancangan Awal RKPD, dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM & KEGIATAN

Pada bab ini diuraikan tentang telaahan terhadap kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja SKPD, Program Kegiatan

BAB IV PENUTUP

Menjelaskan Catatan Penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah pelaksanaan, dan Rencana Tindak Lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Demikian halnya dengan Renja UPTD RSUD Puruk Cahu Tahun 2021. Evaluasi Renja Tahun 2021 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program & Kegiatan, pelaksanaan rencana program & Kegiatan, dan hasil rencana program & kegiatan.

Evaluasi pelaksanaan Renja UPTD RSUD Puruk Cahu Sampai dengan Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel 2.1 dibawah ini.

Tabel 2.1

**Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Pencapaian
Renstra UPTD RSUD Puruk Cahu s/d Tahun 2021 Kabupaten Murung Raya**

No	Uraian		Anggaran (Rp)	Realisasi keuangan		Realisasi Fisik (%)	Sisa Anggaran(Rp)
				Rp	%		
	Belanja Pegawai		15.488.422.526	15.188.111.537	98,06	100	300.310.989
	Program Penunjang Usulan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota						
	Kegiatan : Administrasi Barang Milik daerah pada SKPD	Belanja Honorium Pengadaan Barang / jasa	59.500.000	43.200.000	72,61	100	16.300.000
1	Sub Kegiatan : Penatausahaan Barang Milik Daerah	BelanjaHonorium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan	19.900.000	16.560.000	83,22	100	3.340.000
		Total	79.400.000	59.760.000	75,26	100	19640.000
	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
1	Sub Kegiatan : penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Belanja Gaji pokok PNS	5.466.917.034	5.434.222.337	99,40	100	32.694.697
		Belanja Tunjangan Keluarga PNS	492.580.000	478.923.466	97,23	100	13.656.534
		Belanja Tunjangan Jabatan PNS	141.100.000	140.020.000	99,23	100	1.080.000
		Belanja Tunjangan Fungsional PNS	638.042.868	594.315.000	93,15	100	43.727.868
		Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	51.498.780	40.765.000	79,16	100	10.733.780
		Belanja Tunjangan Beras PNS	350.000.000	330.814.560	94,52	100	19.185.440
		Belanja Tunjangan Pph/Tunjangan Khusus PNS	16.000.000	7.875.562	49,22	100	8.124.438

		Belanja Pembulatan Gaji PNS	1.500.000	84.573	5,64	100	1.415.427
		Belanja luran Jaminan Kecelakaan kerja PNS	13.500.000	11.186.620	82,86	100	2.313.380
		Belanja luran Jaminan Kematian PNS	38.000.000	33.559.419	88,31	100	4.440.581
		Tambahan Penghasilan berdasarkan beban Kerja PNS	837.791.387	800.312.500	95,53	100	37.478.887
		Tambahan Penghasilan Berdasarkan kondisi Kerja PNS	3.179.132.457	3.097.417.500	97,43	100	81.714.957
		Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	3.992.750.000	3.971.485.000	99,47	100	21.265.00
		Total	15.218.812.526	14.940.981.537	98,17	100	277.830.989
2	Sub Kegiatan : Pelaksanaan/Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Belanja Honorium Penanggungjawaban pengelola Pengelola Keuangan	190.210.000	187.370.000			
		Total	190.210.000	187.370.000	98,51	100	2.840.000
	Belanja Barang dan Jasa		18.777.222.287	16.325.426.002	86.94	100	2.451.796.285
	Program Penunjang urusan Pemerintah daerah Kabupaten / Kota						
	Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah						
1	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Belanja Lembur	5.943.000	5.943.000	100,00	100	-
		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.360.000	3.360.000	100,00	100	-
		Total	9.303.000	9.303.000	100,00	100	-
2	Sub Kegiatan : Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD	Belanja Jasa Pengelolaan BMD Yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	10.800.000				
		Total	10.800.000	10.800.000	100,00	100	-

	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah						
1	Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor – Alat Listrik	51.990.800				
		Total	51.990.000	51.990.800	100,00	100	-
2	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Kegiatan Perlengkapan Kantor	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor – Alat/bahan untuk Kegiatan	10.000.000				
		Total	10.000.000	-	-	-	10.000.000
3	Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Belanja Bahan-bahan Lainnya	86.980.000	86.980.000	100,00	100	-
		Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan	1.175.213.000	1.174.032.550	99,90	100	1.180.450
		Total	1.262.193.000	1.261.012.550	99,91	100	1.180.450
4	Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-kertas dan Cover	48.875.000	48.875.000	100,00	100	-
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan kantor-Bahan cetak	237.880.335	237.862.308	99,99	100	18.027
		Total	286.737.308	286.737.308	99,99	100	18.027
5	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Belanja Perjalanan Dinas biasa	74.007.000	38.533.159	52,07	100	35.473.841
		Belanja perjalanan Dinas tetap	9.000.000	7.620.000	84,67	100	1.380.000
		Belanja perjalanan dinas dalam Kota	35.280.000	35.140.000	99,60	100	140.000
		Total	118.287.000	81.293.159	68.73	100	36993.841
	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintah daerah						

1	Sub Kegiatan : Penyediaan jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Belanja Tagihan Air	96.084.000	96.072.600	99,99	100	11.400
		Belanja tagihan Listrik	172.003.504	172.003.504	100,00	100	-
		Total	268.087.504	268.076.104	100,00	100	11.400
2	Sub Kegiatan : penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	127.400.000	88.020.000	69,09	100	39.380.000
		Belanja Jasa Tenaga Administrasi	4.474.610.000	4.446.373.000	99,37	100	28.237.000
		Belanja Jasa Tenaga Keamanan	234.000.000	224.000.000	95,73	100	10.000.000
		Belanja Jasa Tenaga Supir	104.000.000	104.000.000	100,00	100	-
		Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN	11.289.888	11.286.791	99,97	100	3.097
		Belanja luran Jaminan Kematian Bagi Non ASN	14.112.360	14.108.490	99,97	100	3.870
		Total	4.956.412.248	4.887.788.281	98,44	100	77.623.967
	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
1	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan Akhir Tahun SKPD	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	210.000	-	0,00	100	210.000
		Belanja Lembur (Laporan Akhir Tahun SKPD)	3.420.000	3.316.000	96,96	100	104.000
		Belanja Perjalanan Dinas Biasa	12.462.000	4.350.000	34,91	100	8.111.200
		Total	16.092.000	7.666.800	47,64	100	8.425.200
2	Sub Kegiatan : Koordiansi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	210.000	210.000			

		Belanja Lembur (Laporan bulanan/Triwulan/Semester SKPD)	3.420.000	3.316.000			
		Total	3.630.000	3.526.000			
3	Sub Kegiatan : Penyusunan pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi anggaran	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	176.400	-	0,00	100	176.400
		Belanja Lembur (Laporan bulanan/triwulan/Semester SKPD)	3.420.000	-	0,00	100	3.420.000
		Total	3.596.400	-	-	-	3.596.400
	Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						
1	Sub Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Belanja Bimbingan Teknis (Kontribusi)	5.000.000	5.000.000	100,00	100	-
		Belanja Perjalanan Dinas Biasa	11.490.000	6.472.000	56,33	100	5.018.000
		Total	16.490.000	11.472.000	69,57	100	5.018.000
	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah						
1	Sub Kegiatan : penyusunann Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	630.000	-	0,00	100	630.000
		Belanja Lembur (Kegiatan Penyusunan Renstra, Renja, RPJMD, RK	10.341.000	6.894.000	66,67	100	3.447.000
		Total	10.971.000	6.894.000	62,84	100	4.077.000
2	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Belanja Lembur (Penyusunan RKA-SKPD)	5.049.000	2.894.000	52,11	100	2.418.000
		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.800.000	2.800.000	100,00	100	-

		Total	7.849.000	5.431.000	69,19	100	2.418.000
3	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Belanja Lembur Perencanaan	2.102.000	1.569.000	74,64	100	533.000
		Belanja Perjalanan Dinas Biasa	12.302.000	8.750.000	71,13	100	3.551.800
		Total	14.404.000	10.319.200	71,64	100	4.084.800
4	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-ALAT tulis Kantor	210.000	-	-	-	210.000
		Belanja Lembur	3.447.000	-	-	-	3.447.000
		Total	3.657.000	-	-	-	3.657.000
5	Sub Kegiatan : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Belanja Lembur Perencanaan	2.102.000	1.860.000	88,49	100	242.000
		Belanja Perjalanan Dinas Biasa	12.302.000	8.750.200	71,13	100	3.551.800
		Total	14.404.000	10.610.000	73,66	100	3.793.800
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat						
	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						
1	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Belanja Obat-obatan-Lainnya	1.361.000.000	1.267.433.000	93,13	100	93.567.000
		Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	9.639.000.000	7.445.500.000	77,24	100	2.193.500.000
		Total	11.000.000.000	8.712.933.000	79,21	100	2.287.067.000
	Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						

1	Sub Kegiatan : Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Lainnya	123.900.000	122.485.000	98,86	100	1.415.000
		Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	77.200.000	77.000.000	99,74	100	200.000
		Total	201.100.000	199.485.000	99,20	100	1.615.000
2	Sub Kegiatan : Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Belanja Pemeliharaan bangunan Gedung-Bangunan Tempat Kerja	100.000.000	-	-	-	-
		Total	100.000.000	100.000.000	100,00	100	-
3	Sub Kegiatan : Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur lainnya	247.800.000	245.961.100	99,26	100	1.838.900
		Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	154.400.000	154.126.500	99,82	100	273.500
		Total	402.200.000	400.087.600	99,47	100	2.112.400
	Belanja Modal		14.589.705.000	13.307.536.752	91,21	100	1.282.168.248
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		11.188.066.000	9.990.821.680	89,30	100	1.197.244.320
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat						
	Kegiatan Penyediaan fasilitas Pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan daerah Kabupaten/Kota						
1	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Belanja Modal Alat lainnya	83.080.000	74.865.000	90,11	100	8.215.000
		Belanja Modal Alat Pendingin	78.496.000	78.496.000	100,00	100	-
		Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	26.490.000	24.000.000	90,60	100	2.490.000

2	Sub Kegiatan : Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan kesehatan	Belanja Modal Komputer Jaringan	1.000.000.000	990.550.000	99,06	100	9.450.000
3	Sub Kegiatan : Pengadaan Alat Kesehtana/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Belanja Modal Alat kedokteran Umum	709.263.446	697.261.795	98,31	100	12.001.651
		Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah	1.611.944.714	1.272.287.630	78,93	100	339.657.084
		Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	2.000.000.000	1.808.663.610	90,43	100	191.336.390
		Belanja Modal Alat Kedokteran ICU	2.000.000.000	1.701.069.795	85,05	100	298.930.205
		Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	1.678.791.040	1.670.971.040	99,53	100	7.820.800
		Belanja Modal Alat Laboraturium kesehatan Kerja	2.000.000.000	1.672.656.810	83,63	100	327.343.190
	Belanja Modal gedung dan Bangunan						
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarkat						
	Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan daerah Kabupaten /Kota						
1	Sub kegiatan : Pembangunan rumah Sakit beserta sarana dan prasarana pendukungnya	Belanja Modal Bangunan gedung kantor	67.213.000	66.439.524	98,85	100	773.476
		Belanja Modal Bangunan Kesehatan	200.000.000	199.640.000	99,82	100	360.000
		Belanja Modal bangunan Gedung Tempat Kerja lainnya	1.000.000.000	933.058.000	93,31	100	66.942.000
2	Sub Kegiatan : pengadaan Prasarana dan Pendukung fasilitas Pelayanan Kesehatan	Belanja Modal bangunan Gedung tempat kerja lainnya	134.426.000	125.777.548	93,57	100	8.648.452
	Belanja Modal Jalan, jaringan dan Irigasi		2.000.000.000	1.991.800.000	99,59	100	8.200.000

	Program pemenuhan Upaya Kesehatan perorangan dan Upaya kesehatan masyarakat						
	Kegiatan Penyediaan fasilitas Pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan daerah Kabupaten/Kota						
1	Sub Kegiatan ; pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Belanja Modal bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	1.000.000.000	996.000.000	99,60	100	4.000.000
		Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	1.000.000.000	995.800.000	99,58	100	4.000.000

Pada Renja 2021 UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Puruk Cahu melaksanakan program kegiatan yang tertuang dalam DPA UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Puruk Cahu yang kemudian mengalami perubahan sebagaimana pada DPPA UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Puruk Cahu yang berjumlah 8 buah kegiatan.

Walaupun pelaksanaan program/kegiatan secara umum dapat dilaksanakan dengan baik, namun untuk realisasi Pendapatan yang masuk kas BLUD RSUD Puruk Cahu dapat tercapai melebihi target yang direncanakan semula Rp. 47.000.000.000,- menjadi Rp. 73.206.401.871,- bertambah Rp. 26.206.401.871,- karena berasal dari klaim jasa layanan peserta jaminan BPJS kesehatan Pasien Covid.

Pada tahun berjalan Renja 2021, terdapat 2 Program 8 Kegiatan dengan Pagu sebesar Rp. 72.546.472.024 yang tertuang dalam DPPA UPTD RSUD Puruk Cahu Tahun Anggaran 2021.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Acuan dalam menganalisis Kinerja Pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja dapat menggunakan SPM untuk mengukur jenis dan mutu pelayanan dasar dan IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

Analisis kinerja pelayanan RSUD Puruk Cahu mengacu Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya nomor 30 Tahun 2020 tentang Standard Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah UPTD RSUD Puruk Cahu dengan hasil rata-rata untuk tahun 2021 sebesar 84,04% sebagai berikut :

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi			Capaian Analisis
				Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2018	Tingkat Capaian	Tahun 2019	Tahun 2018	Tahun 2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12	13
1	Gawat Darurat												
	1 Kemampuan menangani life saving anak dan dewasa	1 100 %		92,50%	100%	100%	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
	2 Jam buka pelayanan Gawat Darurat	2 24 Jam		24 Jam	24 Jam	24 Jam	24 Jam	24 Jam	100 %	24 Jam	24 Jam	24 Jam	
	3 Pemberian Pelayanan kegawatdaruratan yang bersertifikat yang masih berlaku BLS/PPGD/GELS/ALS	3 100%		85%	90%	100%	100%	100 %	100 %	90%	100%	100%	
	4 Ketersediaan tim penanggulangan bencana	4 Satu tim		Satu tim	Satu tim	Satu tim	Satu tim	Satu tim	100 %	Satu tim	Satu tim	Satu tim	
	5 Waktu tanggap pelayanan Dokter di Gawat Darurat	5 ≤ 5 menit		5 menit	3 menit	1 menit	1 menit	1 menit	100 %	3 menit	1 menit	1 menit	
	6 Kepuasan Pelanggan Gawat Darurat	6 ≥ 70%		60%	65%	70%	75%	70 %	70 %	65%	70%	75%	
	7 Kematian pasien ≤ 24 jam	7 ≤ 2 ‰		6,16 ‰	6 ‰	5 ‰	4 ‰	5 ‰	100 %	6 ‰	5 ‰	4 ‰	
	8 Tidak adanya pasien yang diharuskan membayar uang muka	8 100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2	Rawat Jalan												
	1 Dokter pemberi pelayanan di Poliklinik Spesialis	1 100% dr spesialis		85,55%	90%	95%	100%	100 %	100 %	90%	95%	100%	

	2	Ketersediaan Pelayanan	2	Pelayanan 11 Spesialistik		100%	100%	100%	100%	100 %	100 %	100%	100%	100%	
	3	Jam Buka Pelayanan	3	08.00 - 13.00 setiap hari kecuali jumat 08.00 – 11.00		70%	80%	90%	100%	07.00 – 13.00 setiap hari kecuali Jumat 07.00 – 10.30	100 %	80%	90%	100%	
	4	Waktu tunggu di rawat jalan	4	≤ 60 menit		120 menit	90 menit	60 menit	30 menit	60 Menit	100 %	90 menit	60 menit	30 menit	
	5	Kepuasan Pelanggan Rawat Jalan	5	≥ 90%		60%	70%	80%	90%	80 %	80 %	70%	80%	90%	
	6	a. Penegakan diagnosa TB melalui pemeriksaan mikroskop TB	6	a. ≥ 60%		100%	100%	100%	100%	100 %	100 %	100%	100%	100%	
		b. Terlaksananya kegiatan pencatatan & pelaporan TB di RS		b. ≥ 60%		100%	100%	100%	100%	100 %	100 %	100%	100%	100%	
3		Rawat Inap													
	1	Pemberi Pelayanan di Rawat Inap	1	a. dr spesialis		58,70%	60 %	60 %	70 %	80 %	100 %	60 %	60 %	70 %	
				b. Perawat min D3		80 %	90 %	100 %	100 %	100 %	100 %	90 %	100 %	100 %	
	2	Dokter penanggung jawab pasien rawat inap	2	100%		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100%	
	3	Ketersediaan Pelayanan Rawat Inap	3	a. Anak		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100%	
				b. Penyakit Dalam		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100%	
				c. Kebidanan		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100%	
				d. Bedah		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100%	

	4	Jam Visite Dokter Spesialis	4	08.00 – 14.00 setiap hari		70 %	80 %	90 %	100 %	100 %	100 %	80 %	90 %	100 %	
	5	Kejadian Infeksi Pasca Operasi	5	≤ 1,5%		0,05 %	0,04 %	0,03 %	0,02 %	0,02 %	100 %	0,04 %	0,03 %	0,02 %	
	6	Kejadian Infeksi nosokomial	6	≤ 1,5%		5,40 %	5,00 %	4,00 %	3,00 %	2,00 %	100 %	5,00 %	4,00 %	3,00 %	
	7	Tidak adanya kejadian pasien jatuh yang berakibat kecacatan/kematian	7	100%		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100%	
	8	Kematian pasien > 48 jam	8	≤ 0,24%		0,02 %	0,02 %	0,02 %	0,02 %	0,02 %	100 %	0,02 %	0,02 %	0,02 %	
	9	Kejadian pulang paksa	9	5 %		0,02 %	0,02 %	0,02 %	0,02 %	0,02 %	100 %	0,02 %	0,02 %	0,02 %	
	10	Kepuasan pelanggan Rawat Inap	10	≥ 90%		70 %	75 %	80 %	85 %	90 %	100 %	75 %	80 %	85 %	
	11	Rawat inap TB													
	a.	Penegakan diagnosa TB melalui pemeriksaan mikroskopis TB	11	a. ≥ 60 %		48 %	55 %	60 %	65 %	70 %	100 %	55 %	60 %	65 %	
	b.	Terlaksanannya kegiatan pencatatan dan pelaporan TB di RS		b. ≥ 60 %		73 %	80 %	85 %	90 %	90 %	100 %	80 %	85 %	90 %	
				c.											
4		Bedah Sentral													
	1	Waktu tunggu operasi elektif	1	≤ 2 hari		5 Hari	4 Hari	3 Hari	2 Hari	2 Hari	100 %	4 Hari	3 Hari	2 Hari	
	2	Kejadian kematian di meja operasi	2	≤ 1 %		0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	100 %	0 %	0 %	0 %	
	3	Tidak adanya kejadian operasi salah sisi	3	100 %		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100%	
	4	Tidak adanya kejadian operasi salah orang	4	100 %		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100%	
	5	Tidak adanya kejadian salah tindakan pada operasi	5	100 %		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100%	

	6	Tidak adanya kejadian tertinggalnya benda asing/lain pada tubuh pasien setelah operasi	6	100 %		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100%	
	7	Komplikasi anestesi karena overdosis reaksi anestesi dan salah penempatan anestesi endotracheal tube	7	≤ 6 %		6 %	5 %	5 %	4 %	3 %	100 %	5 %	5 %	4 %
5	Pelayanan Persalinan													
	1	Kejadian kematian ibu karena persalinan	1	a. Perdarahan ≤ 1 %		0,22 %	0,20 %	0,20 %	0,10 %	0,20 %	100 %	5 %	5 %	4 %
				b. Pre-eklampsia ≤ 30%		0,52 %	0,50 %	0,50 %	0,40 %	0,50 %	100 %	0,50 %	0,50 %	0,40 %
				c. Sepsis ≤ 0,2%		0,30 %	0,20 %	0,20 %	0.10 %	0,20 %	100 %	0,20 %	0,20 %	0.10 %
	2	Pemberi pelayanan persalinan normal	2	a. Dokter Sp.OG		0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	100 %	0 %	0 %	0 %
				b. Dokter Umum Terlatih (Asuhan Persalinan Normal)		0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	100 %	0 %	0 %	0 %
				c. Bidan		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100%
	3	Pemberi pelayanan persalinan dengan penyulit	3	Tim PONEK yang terlatih		60 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100%
	4	Pemberi pelayanan persalinan dengan tindakan operasi		a. Dokter Sp. OG		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100%
				b. Dokter Sp.A		0,00 %	50 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100%
				c. Dokter Sp.An		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100%
	5	Kemampuan menangani BBLR 1500 – 2500 gr		100 %		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100%

	6	Pertolongan persalinan melalui seksio cesaria	≤ 20 %		48,70 %	40 %	30 %	25 %	20 %	100 %	40 %	30 %	25 %	
	7	Keluarga Berencana												
	a.	Persentase KB (Vasektomi & Tubektomi) yang dilakukan oleh tenaga kompeten dr. Sp.OG, dr. Sp.B, dr. Umu terlatih	7 a. 100 %		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100%	
	b.	Persentase peserta KB mantap mendapatkan konseling KB mantap oleh bidan terlatih	b. 100 %		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100%	
	8	Kepuasan Pelanggan	≥ 80 %		70 %	75 %	80 %	85 %	90 %	100 %				
6		Pelayanan Intensif												
	1	Rata-rata pasien yang kembali ke perawatan intensif dengan kasus yang sama <72 jam	3 %		6 %	5 %	4 %	3 %	3 %	100 %	5 %	4 %	3 %	
	2	Pemberi pelayanan unit Intensif	2 a. Dokter Sp. Anestesi dan dokter spesialis sesuai dengan kasus yang ditangani		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100%	
			b. 100 % perawat minimal D3 dengan sertifikat Perawat Mahir ICU/setara D4		60 %	80 %	100 %	100 %	100 %	100 %	80 %	100 %	100 %	
7		Pelayanan Radiologi												
	1	Waktu tunggu hasil pelayanan thoraks foto	1 ≤ 3 jam		6 jam	5 jam	4 jam	3 jam	1 jam	100 %	5 jam	4 jam	3 jam	
	2	Pelaksanaan ekspertis	2 Dokter Sp.Rad		82 %	85 %	90 %	95 %	95 %	100 %	85 %	90 %	95 %	

	3	Kejadian kegagalan pelayanan Rontgen	3	Kerusakan foto ≤ 2 %		4,60 %	4 %	3 %	2 %	2 %	100 %	4 %	3 %	2 %	
	4	Kepuasan Pelanggan	4	≥ 80 %		60 %	70 %	80 %	90 %	90 %	100 %	70 %	80 %	90 %	
8	Pelayanan Laboratorium Patologi Klinik														
	1	Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium	1	≤ 140 menit Kimia Darah dan Darah Rutin		300 menit	180 menit	180 menit	180 menit	180 menit	100 %	180 menit	180 menit	180 menit	
	2	Pelaksanaan ekspertisi	2	Dokter Sp.PK		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
	3	Tidak adanya kesalahan pemberian hasil pemeriksaan laboartorium	3	100 %		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100%	
	4	Kepuasan pelanggan	4	≥ 80 %		60 %	65 %	70 %	75 %			65 %	70 %	75 %	
9	Pelayanan Rehabilitasi Medik														
	1	Kejadian drop out pasien terhadap pelayanan rehabilitasi medik yang direncanakan	1	≤ 50 %		25 %	25 %	20 %	20 %	20 %	100 %	25 %	20 %	20 %	
	2	Tidak adanya kejadian kesalahan tindakan rehabilitasi medik	2	100 %		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100%	
	3	Kepuasan Pelanggan	3	≥ 80 %		80 %	80 %	85 %	85 %	85 %	100 %	80 %	85 %	85 %	
10	Pelayanan Farmasi														
	1	Waktu tunggu pelayanan													
	a.	Obat jadi	1	a. ≤ 30 menit		60 menit	45 menit	30 Menit	30 Menit	30 Menit	100 %	45 menit	30 Menit	30 Menit	

[illegible]

[illegible]

	1	Tindak lanjut penyelesaian hasil pertemuan direksi	1	100 %		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
	2	Kelengkapan laporan akuntabilitas kinerja	2	100 %		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
	3	Ketepatan waktu pengusulan kenaikan pangkat	3	100 %		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
	4	Ketepatan waktu pengusulan gaji berkala	4	100 %		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
	5	Karyawan yang mendapat pelatihan minimal 20 jam setahun	5	≥ 60 %		15,60 %	18 %	20 %	22 %	20 %	100 %	18 %	20 %	22 %
	6	Cost Recovery	6	≥ 40 %		38,92 %	41,19 %	45,19 %	49, 57 %	45,19 %	100 %	41,19 %	45,19 %	49, 57 %
	7	Ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan	7	100 %		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
	8	Kecepatan waktu pemberian informasi tentang tagihan pasien rawat inap	8	≤ 2 jam		3,5 jam	3 jam	2,5 jam	2,25 jam	2,5 jam	100 %	3 jam	2,5 jam	2,25 jam
	9	Ketepatan waktu pemberian imbalan (intensif) sesuai kesepakatan waktu	9	100 %		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
17	Pelayanan Ambulan/Kereta Jenazah													
	1	Waktu pelayanan Ambulan/Kereta Jenazah	1	24 Jam		24 Jam	24 Jam	24 Jam	24 Jam	24 Jam	100 %	100 %	24 Jam	24 Jam
	2	Kecepatan memberikan pelayanan Ambulan/kereta jenazah di RS	2	≤ 30 menit		60 menit	45 menit	30 menit	30 menit	30 menit	100 %	100 %	30 menit	30 menit

	3	Response time pelayanan ambulan oleh masyarakat yang membutuhkan	3	Sesuai ketentuan daerah		45 menit	30 menit	25 menit	20 menit	25 menit	100 %	100 %	25 menit	20 menit	
18	Pelayanan Pemulasaran Jenazah														
	1	Waktu tanggap (response time) pelayanan pemulasaran Jenazah	1	≤ 2 jam		3 jam	3 jam	3 jam	2 jam	3 jam	100 %	100 %	3 jam	2 jam	
19	Pelayanan Laundry														
	1	Tidak adanya kejadian linen yang hilang	1	100 %		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
	2	Ketepatan waktu	2	100 %		70 %	80 %	90 %	95 %	90 %	100 %	80 %	90 %	95 %	
20	Pelayanan Pemeliharaan Rumah Sakit														
	1	Kecepatan waktu menanggapi kerusakan alat	1	≤ 80 %		80 %	80 %	85 %	85 %	85 %	100 %	80 %	85 %	85 %	
	2	Ketepatan waktu pemeliharaan alat	2	100 %		50 %	55 %	60 %	65 %	60 %	100 %	55 %	60 %	65 %	
	3	Peralatan laboratorium dan alat ukur yang digunakan dalam pelayanan terkalibrasi tepat waktu sesuai ketentuan kalibrasi	3	100 %		70 %	75 %	80 %	85 %	80 %	100 %	100 %	80 %	85 %	
21	Pelayanan Pencegahan Pengendalian Infeksi														
	1	Adanya anggota Tim PPI yang terlatih	1	Anggota Tim PPI yang terlatih 75 %		78 %	80 %	85 %	90 %	85 %	100 %	80 %	85 %	90 %	

	2	Tersedianya APD di setiap Instalasi	2	60 %		60 %	60 %	65 %	65 %	65 %	100 %	60 %	65 %	65 %	
	3	Kegiatan pencatatan dan pelaporan Infeksi Nosokomial/(HAI) Health Care Assosiated Infection di RS (Minimal 1 Parameter)	3	75 %		60 %	65 %	70 %	75 %	70 %	100 %	65 %	70 %	75 %	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

UPTD RSUD Puruk Cahu adalah rumah sakit klas C non pendidikan dengan PPK BLUD yang sedang berkembang sehingga masih diperlukannya peningkatan dan penataan yang baik, baik sistem, sarana dan prasana. Meskipun rumah sakit tipe C namun standar Sumber Daya Manusia, peralatan dan sarana pendukung lain adalah di atas standar rumah sakit tipe C atau dapat dikatakan C plus dan sedang dipersiapkan untuk menjadi Klas B sehingga ke depan pengembangan pelayanan terus dikembangkan dengan sumber daya yang ada serta mampu menyediakan pelayanan dan fasilitas pendukung pelayanan sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat. Isu-isu strategis yang tengah dihadapi oleh UPTD RSUD saat ini dapat diuraikan sebagai berikut :

2.3.1 kekuatan dan kelemahan

a. Kekuatan (Strength)

- 1) Tersedianya Tenaga Medis Spesialis (PNS) tetap dan didukung beberapa peralatan canggih.
- 2) Telah diperolehnya sertifikasi Akreditasi Rumah Sakit Tingkat Pertama dengan 4 (empat) pelayanan.
- 3) RSUD Puruk Cahu telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).

b. Kelemahan (Weakness)

- 1) Masih kurangnya ketersediaan lahan parkir, sarana, prasarana yang sesuai dengan standar pelayanan Rumah Sakit.
- 2) Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIM RS) belum terintegrasi dengan baik.
- 3) Monitoring, evaluasi dan analisis terhadap Kebijakan, Program-program, Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Prosedur Operasional (SPO) dan hasil kegiatan belum optimal.

2.3.2 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan UPTD RSUD Puruk Cahu

a. Tantangan (Threat)

- 1) Undang-undang perlindungan konsumen yang banyak berpihak kepada pasien/masyarakat dan makin tingginya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang bermutu.
- 2) Adanya penambahan jumlah dan kemampuan Rumah Sakit Mitra, baik Rumah Sakit Swasta maupun Rumah Sakit Pemerintah di sekitar Kabupaten Murung Raya yang berdampak adanya peningkatan persaingan secara positif.

- 3) Pemahaman masyarakat terhadap pelaksanaan Sistem Jaminan Kesehatan Nasional masih rendah.
- b. Peluang (Opportunity)
 - 1) Diterapkannya Sistem Rujukan berjenjang dari tingkat dasar ke tingkat lanjutan.
 - 2) Letak Rumah Sakit Umum Daerah Puruk Cahu yang strategis di tengah kota Puruk Cahu dan dapat dicapai dengan angkutan darat baik roda 4 maupun roda 2.

2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sebagai SKPD dengan tugas pokok dan fungsi melaksanakan upaya kesehatan, upaya penyembuhan, dan pemulihan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dengan upaya pencegahan dan upaya rujukan, peran masyarakat sangat penting dalam mendukung semua program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Adapun program dan kegiatan pelayanan kesehatan yang terkait dan dibutuhkan oleh masyarakat serta diusulkan sebagai peran serta masyarakat untuk berkontribusi dalam pembangunan kesehatan/pengembangan pelayanan kesehatan di RSUD Puruk Cahu dijabarkan ke dalam program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Pelayanan kesehatan di RSUD Puruk Cahu ditambah atau diperluas jenisnya dengan menyesuaikan perkembangan kasus penyakit yang dialami masyarakat.
2. Tetap memberikan pelayanan kesehatan maksimal pada masyarakat miskin.
3. Melibatkan masyarakat dalam sosialisasi dan informasi melalui dialog interaktif tentang kesehatan dan rumah sakit.

Usulan kegiatan sebagai aspirasi masyarakat tersebut secara menyeluruh ditampung dan disinergikan dengan Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Program Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan (RPJPK) 2005-2025, kondisi pembangunan kesehatan diharapkan telah mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang ditunjukkan dengan membaiknya berbagai indikator pembangunan Sumber Daya Manusia, seperti meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat, meningkatnya kesejahteraan gender, meningkatnya tumbuh kembang optimal, kesejahteraan dan perlindungan anak, terkendalinya jumlah dan laju pertumbuhan penduduk, serta menurunnya kesenjangan antar individu, antar kelompok masyarakat, dan antar daerah. Dalam upaya mendukung arah kebijakan nasional yaitu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat maka UPTD RSUD Puruk Cahu berusaha mewujudkan pelayanan kesehatan yang optimal kepada masyarakat, kemudian diharapkan mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Murung Raya.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

UPTD RSUD Puruk Cahu sebagai salah satu SKPD di Kabupaten Murung Raya memiliki tugas membantu Kepala Daerah dengan tugas pokok dan fungsi menjalankan sebagian urusan pemerintahan dalam bidang pelayanan kesehatan kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Murung Raya 2018-2023 yaitu ***“Terwujudnya Masyarakat Sejahtera Yang Mandiri dan Bermartabat, Berbasis Pembangunan Perdesaan Menuju Murung Raya Emas Tahun 2030”***.

UPTD RSUD Puruk Cahu telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) 2018-2023. Dokumen tersebut merupakan fokus pelaksanaan tugas UPTD RSUD Puruk Cahu selama lima tahun. Pelaksanaan tugas tersebut ditujukan untuk mencapai target yang telah ditetapkan dalam Renstra dan juga mencapai target yang ditetapkan RPJMD.

Rencana Kerja UPTD RSUD Puruk Cahu Tahun 2021 disusun dengan maksud sebagai pedoman dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis UPTD RSUD Puruk Cahu Tahun 2018 – 2023. UPTD RSUD Puruk Cahu mempunyai visi sebagai berikut :

“Terwujudnya Rumah Sakit Yang Unggul dan Menjadi Pilihan Utama Masyarakat Murung Raya dan Sekitarnya”.

Visi tersebut memiliki dua pokok visi yaitu Terwujudnya Rumah Sakit Yang Unggul dan Menjadi Pilihan Utama Masyarakat Murung Raya dan Sekitarnya. Terwujudnya Rumah Sakit yang Unggul dapat dijelaskan harus unggul dalam semua jenis pelayanan yang ada di UPTD RSUD Puruk Cahu dan memiliki mutu sesuai standar pelayanan. Menjadi Pilihan Utama Masyarakat Murung Raya dan Sekitarnya dapat dijelaskan bahwa sebagai satu-satunya rumah sakit pemerintah di Kabupaten Murung Raya maka harus menjadi rumah sakit yang dapat memberikan pelayanan kesehatan terbaik dibandingkan rumah sakit lainnya di wilayah kalimantan tengah terutama di Kabupaten Barito Utara sebagai rumah sakit terdekat sehingga menjadi pilihan utama masyarakat Murung Raya dan sekitarnya.

Untuk mewujudkan visi tersebut maka ditetapkan misi UPTD RSUD Puruk Cahu sebagai berikut :

1. Memberikan pelayanan prima pada masyarakat
2. Meningkatkan profesionalisme Sumber Daya Manusia
3. Melaksanakan peningkatan mutu berkelanjutan (Continuous quality improvement)
4. Meningkatkan jalinan kerjasama dengan institusi terkait
5. Melengkapi saran dan prasarana secara bertahap

Guna mewujudkan misi tersebut maka tujuan dan sasaran Rencana Kerja Tahun 2021 sebagai berikut :

3.2.1 Tujuan

1. Meningkatkan mutu dan pelayanan kepuasan pelanggan
2. Meningkatkan profesionalisme manajemen RS
3. Mewujudkan UPTD RSUD Puruk Cahu sebagai RS Unggulan dan menjadi pilihan utama masyarakat Murung Raya dan sekitarnya

3.2.2 Sasaran

1. Meningkatnya kualitas administrasi, pelayanan medis, dan penunjang medis, pelayanan obat serta perbekalan kesehatan kepada pelanggan.
2. Meningkatnya pemanfaatan teknologi dan sistem informasi manajemen RS
3. Meningkatnya sarana dan prasarana pelayanan kesehatan

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja UPTD RSUD Puruk Cahu Tahun 2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Tahun 2022
1	2	3	4
Meningkatkan mutu dan pelayanan kepuasan pelanggan	Meningkatnya kualitas administrasi, pelayanan medis dan penunjang medis, pelayanan obat serta perbekalan kesehatan kepada pelanggan	Persentase pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)	75%
		Indeks Kepuasan Pelanggan (IKP)	≥ 80%
Meningkatkan Profesionalisme manajemen RS	Meningkatnya pemanfaatan teknologi dan sistem informasi manajemen RS	Persentase implementasi SIMRS terintegrasi	≥ 60%
Mewujudkan RSUD Puruk Cahu sebagai RS Unggulan dan menjadi pilihan utama masyarakat Murung Raya dan sekitarnya	Meningkatnya sarana dan prasarana pelayanan kesehatan	Persentase sarana dan prasarana pelayanan kesehatan sesuai standar RSU klas C	≥ 95%

3.3 Program dan Kegiatan

Tahun 2021 adalah tahun Ketiga pelaksanaan Rencana Strategis UPTD RSUD Puruk Cahu tahun 2018 – 2023 yang dituangkan dalam Rencana Kerja Tahun 2021 yang memuat rencana program dan kegiatan, serta kebutuhan dana/pagu indikatif yang direncanakan untuk dianggarkan dalam APBD. Pada tahun 2021 UPTD RSUD Puruk Cahu merencanakan **2** program, **8** kegiatan dan **29** sub kegiatan dengan total biaya Rp. 72.546.472.024 dan BLUD sebesar Rp. 47.000.000.000

Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya maka UPTD RSUD Puruk Cahu pada tahun 2021 memperoleh anggaran dana yang bersumber dari APBD Kabupaten Murung Raya (sesuai dengan APBD Perubahan) dengan total Belanja Daerah sebesar Rp. 48.855.349.813 terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 34.265.644.813 dan Belanja Modal sebesar Rp. 14.489.705.000

Pelaksanaan program dan kegiatan yang sumber dananya berasal dari Belanja Daerah tahun anggaran 2021 adalah sebesar Rp 48.855.349.813 dengan realisasi keuangannya mencapai sebesar Rp 44.821.074.291,- atau sebesar Rp. 91,74 % dan realisasi fisik sebesar 100 %.

Sementara untuk anggaran dana yang bersumber dari Belanja BLUD UPTD RSUD Puruk Cahu (sesuai dengan anggaran perubahan) dengan pagu target pendapatan Rp. 47.000.000.000 mendapatkan surplus pendapatan sebesar Rp. 26.206.401.871 sehingga total Pendapatan BLUD menjadi Rp. 73.206.401.871 atau sebesar 155,76%.

Pelaksanaan Belanja yang bersumber dananya dari Belanja BLUD Tahun Anggaran 2021 adalah Rp. 53.850.000.000 dengan realisasi keuangannya Rp. 53.105.185.564 atau sebesar 98,62% dan realisasi fisik sebesar 100%.

Rumusan rencana Program dan Kegiatan UPTD RSUD Puruk Cahu Tahun 2021 dan Prakiraan Maju Tahun 2022 kami tuangkan pada Tabel 3.2 berikut :

Kode				Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2021			Catatan	Prakiraan Maju	Tahun 2022
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7	8	9
				Sub Kegiatan : Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD							
				Bidang Urusan Kesehatan							
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran							
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat							
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional							
				Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan							
				Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor							
				Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja							
				Penyediaan Alat Tulis Kantor							
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan							
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga							
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
				Penyediaan Makanan dan Minuman							

				Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah						
				Penyediaan Jasa Pendukung Perkantoran						
				Pembangunan Gedung Kantor						
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						
				Pembangunan Gedung Kantor						

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan			Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2021			Catatan	Prakiraan Maju	Tahun 2022
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2			3	4	5	6	7	8	9
				Pengadaan Mobil Jabatan						
				Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional						
				Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas						
				Pengadaan Peralatan Gedung Kantor						
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas						
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional						
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor						
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor						
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur						

				Pendidikan dan Pelatihan Formal							
				Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan							
				Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran							
				Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran							
				Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun							
				Penyusunan Renstra							
				Penyusunan Renja/Renja Perubahan							
				Penyusunan RKA/RKAP, DPA/DPPA							
				Penyusunan LAKIP							
				Penyusunan Pelaporan Pendapatan Semesteran							

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2021			Catatan	Prakiraan Maju	Tahun 2022
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Penyusunan Pelaporan Pendapatan Akhir Tahun						
		Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat						
		Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat						
		Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan						
		Pembuatan Profil Kesehatan						
		Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit						
		Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata						
		Pembangunan Rumah Sakit						
		Pembangunan Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit						
		Rehabilitasi Bangunan Rumah Sakit						
		Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit						
		Pengadaan Mebeuleur Rumah Sakit						

				Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga (dapur, ruang Pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain)							
				Pengadaan Bahan-bahan Logistik Rumah Sakit							
				Pengembangan Tipe Rumah Sakit							

1

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2021			Catatan	Prakiraan Maju	Tahun 2022
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata							
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Ruang Rawat Inap RS (VVIP, VIP, Kelas I, II dan III)							
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Ruang Operasi							
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Ruang Bersalin							
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit							
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Sakit							
	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan							
	Kemitraan Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular							
			Jumlah				Jumlah	

2

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	KUA-PPAS Tahun 2023		Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Tolok Ukur	Target		
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							103.589.525.780	
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							80.254.525.780	
1	02	01	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							50.000.000	
1	02	01	2,01	02	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ihisar kinerja skpd dalam pemenuhan Rasio dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun tepat						5.000.000	
1	02	01	2,01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Terlaksananya Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ihisar kinerja skpd dalam pemenuhan Rasio dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun tepat Waktu						15.000.000	

1	02	01	2,01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Terlaksananya Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ihsar kinerja skpd dalam pemenuhan Rasio dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun tepat Waktu						5.000.000
1	02	01	2,01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Terlaksananya Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ihsar kinerja skpd dalam pemenuhan Rasio dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun tepat Waktu						10.000.000
1	02	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ihsar kinerja skpd dalam pemenuhan Rasio dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun tepat						7.500.000
1	02	01	2,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dalam pemenuhan Rasio dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun tepat waktu						7.500.000
1	02	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							17.490.545.700
1	02	01	2,02	01	Penyediaan Gaji Tunjangan ASN	Tersedianya dokumen Gaji dan Tunjangan ASN						16.500.000.000
1	02	01	2,02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya dokumen pengelolaan administrasi keuangan dan jasa pengelolaan administrasi keuangan selama 1 tahun						965.545.700

1	02	01	2,02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD							5.000.000
1	02	01	2,02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terlaksananya Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ihisar kinerja skpd dalam pemenuhan Rasio dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun tepat						10.000.000
1	02	01	2,02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD	Perencanaan dan Keuangan						5.000.000
1	02	01	2,02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Terlaksananya Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ihisar kinerja skpd dalam pemenuhan Rasio dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun tepat						5.000.000
					Program peningkatan disiplin aparatur							1.050.000.000
					Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Adanya Pakaian Dinas beserta kelengkapannya						500.000.000
					Pengadaan pakaian kerja lapangan	Adanya pakaian kerja lapangan						300.000.000

					Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Adanya Pakaian Olah Raga untuk UPTD RSUD PURUK CAHU						250.000.000
					Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur							500.000.000
					Pendidikan dan pelatihan formal	Adanya Anggaran untuk peningkatan pengetahuan SDM rumah sakit tentang standar pelayanan rumah sakit terakreditasi melalui diklat						500.000.000
1	02	01	2,03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							27.500.000
1	02	01	2,03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Aset Kesehatan						10.000.000
1	02	01	2,03	04	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD							10.000.000
1	02	01	2,03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Aset Kesehatan						7.500.000
1	02	01	2,05		Peningkatan Pelayanan BLUD							47.000.000.000
1	02	01	2,05	02	Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD	Terpenuhinya Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD						47.000.000.000
1	02	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							3.900.000.000
1	02	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Perlengkapan Listrik/Elektronik/ Batrei	Tersedianya Penyediaan Komponen Perlengkapan Listrik/Elektronik/ Batrei						100.000.000

1	02	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan Kantor						1.000.000.000
1	02	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Penyediaan Bahan Logistik Kantor						2.000.000.000
1	02	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Pegandaan						200.000.000
1	02	01	2,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya penyediaan makanan dan minuman selama 1 tahun						100.000.000
1	02	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya biaya perjalanan dinas dalam rangka rapat- rapat koordinasi, sinkronisasi, harmonisasi pelaksanaan tugas selama 1 tahun Tersedianya Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam rangka evaluasi, rapat-rapat koordinasi, dan penilaian kinerja selama 1 tahun						500.000.000
1	02	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							2.000.000.000
1	02	01	2,07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Mobil Dinas						1.500.000.000
1	02	01	2,07	09	Penyediaan Umum Perkantoran	Tersedianya Penyediaan Umum Perkantoran						500.000.000
1	02	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							8.186.480.080
1	02	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rata - Rata Capaian Bidang Pelayanan Adminnistrasi Perkantoran						10.000.000

1	02	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rata - Rata Capaian Bidang Pelayanan Administrasi Perkantoran						1.000.000.000
1	02	01			Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Tersedianya Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan						50.000.000
1	02	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						7.126.480.080
					Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat							50.000.000
					Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat	Adanya Poster, Leaflet, Spanduk, Baliho, Kamera, TV LCD, Mikropon Rapat 4 chanel, Handycam + Tripod, Tripod LCD Proyektor, Whiteboard, Mobiler Diklat dan Media Promosi						50.000.000
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							23.245.000.000
1	02	02	2,01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota							21.150.000.000
1	02	02	2,01	01	Pembangunan Rumah Sakit beserta sarana dan prasarana pendukungnya							5.000.000.000
1	02	02	2,01	08	Rehabilitasi dan pemeliharaan Rumah Sakit							1.000.000.000
1	02	02	2,01	13	Pengadaan dan Prasarana Pendukung Fasilitas Pelayanan kesehatan							1.000.000.000

1	02	02	2,01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/ Penunjang Medik fasilitas Pelayanan kesehatan							10.000.000.000
					Pengadaan Obat, Vaksin							50.000.000
					Pengadaan Bahan Habis Pakai							1.000.000.000
					Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan							500.000.000
					Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya							1.000.000.000
					Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya							200.000.000
					Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan							400.000.000
					Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan							1.000.000.000
					Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaen/Kota Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaen/Kota Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaen/Kota Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaen/Kota					350.000.000		
					Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan							100.000.000

					Akreditasi Rumah Sakit Rujukan Pasien Masyarakat Miskin							250.000.000
					Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							1.680.000.000
					Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional							100.000.000
					Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya							100.000.000
					Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah							1.000.000.000
					Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota							100.000.000
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil							30.000.000
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir							50.000.000
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita							50.000.000
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut							30.000.000
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi							20.000.000
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus							30.000.000

					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat							20.000.000
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis							50.000.000
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV							20.000.000
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan							20.000.000
					Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan							20.000.000
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)							20.000.000
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA							20.000.000
					Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi							65.000.000
					Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet							30.000.000
					Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan							20.000.000
					Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan							15.000.000
					PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN							70.000.000

					Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota							50.000.000
					Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat							50.000.000
					Pelaksanaan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota							20.000.000
					Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat							20.000.000
					PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN							20.000.000
					Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan Di Wilayah Kabupaten/Kota							20.000.000
					Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan							20.000.000
TOTAL												103.589.525.780

BAB V

PENUTUP

Renja UPTD RSUD Puruk Cahu Tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan yang penting dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2021 di lingkup UPTD RSUD Puruk Cahu.

Renja UPTD RSUD Puruk Cahu Tahun 2021 mengacu kepada Renstra UPTD RSUD Puruk Cahu Tahun 2018 – 2023, yang telah memuat hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, memuat permasalahan yang dihadapi oleh UPTD RSUD Puruk Cahu dalam pelaksanaan dan Program Kegiatan, serta telah mengakomodir usulan program dan kegiatan yang berasal dari masyarakat.

Optimalisasi dalam pelaksanaan isi Renja merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan urusan wajib yang diemban oleh UPTD RSUD Puruk Cahu sebagai salah satu SKPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Murung Raya. Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya dukungan dari seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan isi Renja UPTD RSUD Puruk Cahu.